

# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

# PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025





#### **BUPATI TRENGGALEK** PROVINSI JAWA TIMUR

#### KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/ 261 /406.001.3/2025

#### TENTANG

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

#### BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 Nomor Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
- 15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 45);

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

#### KEDUA

- : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri dari:
  - 1. Lampiran I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - 2. Lampiran II Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 3. Lampiran III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 4. Lampiran IV Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - 5. Lampiran V Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
  - 6. Lampiran VI Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 7. Lampiran VII Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 8. Lampiran VIII Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - 9. Lampiran IX Dinas Pertanian dan Pangan;
  - 10. Lampiran X Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 11. Lampiran XI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 12. Lampiran XII Dinas Perhubungan;
- 13. Lampiran XIII Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14. Lampiran XIV Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- 15. Lampiran XV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16. Lampiran XVI Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 17. Lampiran XVII Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 18. Lampiran XVIII Dinas Perikanan;
- 19. Lampiran XIX Sekretariat Daerah;
- 20. Lampiran XX Sekretariat DPRD;
- 21. Lampiran XXI Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 22. Lampiran XXII Badan Keuangan Daerah;
- 23. Lampiran XXIII Badan Kepegawaian Daerah;
- 24. Lampiran XXIV Inspektorat;
- 25. Lampiran XXV Kecamatan Trenggalek;
- 26. Lampiran XXVI Kecamatan Panggul;
- 27. Lampiran XXVII Kecamatan Suruh;
- 28. Lampiran XXVIII Kecamatan Durenan;
- 29. Lampiran XXIX Kecamatan Pogalan;
- 30. Lampiran XXX Kecamatan Watulimo;
- 31. Lampiran XXXI Kecamatan Tugu;
- 32. Lampiran XXXII Kecamatan Dongko;
- 33. Lampiran XXXIII Kecamatan Kampak;
- 34. Lampiran XXXIV Kecamatan Munjungan;
- 35. Lampiran XXXV Kecamatan Pule;
- 36. Lampiran XXXVI Kecamatan Gandusari;
- 37. Lampiran XXXVII Kecamatan Bendungan;
- 38. Lampiran XXXVIII Kecamatan Karangan;
- 39. Lampiran XXXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 40. Lampiran XL Dinas Peternakan.

KETIGA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI TRENGGALEK, ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 100.3.3.2/261/406.001.3/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

## PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025

#### BAB I PENDAHULUAN

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini menyusun Renja Perubahan Tahun 2025.

Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Perubahan serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sampai dengan triwulan I dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan.

#### 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2

- Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045;
- 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
- 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
- 31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;

- 32. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 33. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045; dan
- 35. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.

#### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen ini adalah:

- Sebagai acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2025;
- 3. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara sistematis dan terorganisir; dan
- 4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

#### 1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Keria (P-Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek disusun sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2025. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek memerlukan adanya penggeseran anggaran dengan tujuan untuk meminimalisir adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal sebagai upaya memenuhi target RPJMD.

#### 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA

#### BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB. II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

#### BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja.

#### BAB. IV. PENUTUP

Memuat hal-hal dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

#### **BAB II**

#### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 pada kondisi sebelum Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) direncanakan sebesar Rp 11.637.346.820,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) melaksanakan 2 urusan pemerintahan yang terdiri dari 4 program dengan 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Namun dengan pertimbangan skala prioritas pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek direncanakan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rр 11.468.299.136,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tigapuluh Enam Rupiah) pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) untuk 2 urusan pemerintahan yang terdiri dari 4 program dengan 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang pencapaian target kinerjanya diperkirakan tidak akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapatnya pergeseran target kinerja maupun perubahan alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan Renja Tahun 2025 mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sampai dengan triwulan I (akhir bulan Maret 2025). Dimana sampai dengan triwulan I untuk pencapaian penyerapan anggaran baru mencapai 17,66% atau baru sebesar Rp 2.054.796.113,00 (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) sedangkan rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 47,62%. Rincian capaian realisasi penyerapan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Trenggalek sampai dengan Triwulan I tahun 2025 atas belanja modal dan belanja operasi yang dikelompokkan dalam nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I

		K	DDE		UNSUR / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I	PERSENTASE KEUANGAN
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11.637.346.820,00	2.054.796.113,00	17,66%
5	1				PERENCANAAN	11.121.924.750,00	2.025.765.613,00	18,21%
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.606.654.549,95	1.773.139.935,00	23,31%
5	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.433.445,65	0	0,00%
5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.467.893,65	0	0,00%
5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.965.552,00	0	0,00%
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.321.445.684,00	1.593.644.068,00	25,21%
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.190.049.684,00	1.593.644.068,00	25,75%
5	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131.396.000,00		0,00%
5	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.854.000,00	1.845.000,00	11,64%
5	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.854.000,00	1.845.000,00	11,64%
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000,00	11.600.000,00	82,86%
5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00	11.600.000,00	82,86%
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.386.000,00	41.275.929,00	9,98%
5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0	0,00%
5	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00	2.116.500,00	29,40%
5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000,00	2.860.000,00	20,43%
5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000		0,00%
5	1	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	99.700.000		0,00%
5	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	3.467.000,00	34,67%
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.606.000,00	31.332.429,00	12,71%
5	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.880.000,00	1.500.000,00	13,79%
5	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.753.470,00		0,00%
5	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.753.470,00		0,00%
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.965.000,00	99.524.538,00	20,61%
5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	23.517.428,00	14,70%
5	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	0	0,00%
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.965.000,00	76.007.110,00	24,84%
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.816.950,30	25.250.400,00	11,23%
5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.466.950,30	25.250.400,00	17,24%
5	1	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	0	0,00%
5	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.940.000	0	0,00%
5	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.410.000,00	0	0,00%
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.303.280.700,00	125.644.900,00	9,64%
5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.193.072.000,00	113.359.900,00	9,50%
5	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	182.755.000,00	77.108.300,00	42,19%

		K	DDE		UNSUR / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I	PERSENTASE KEUANGAN
5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	50.874.000,00	17.537.500,00	34,47%
5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	248.831.000,00		0,00%
5	1	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.538.000,00	6.115.200,00	29,78%
5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	erencanaan Pembangunan Daerah 690.074.000,00 12.598.900,00		1,83%
5	1	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	110.208.700,00	12.285.000,00	11,15%
5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.208.700,00	12.285.000,00	11,15%
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.211.989.500,05	126.980.778,00	5,74%
5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	616.915.338,05	73.909.774	11,98%
5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.330.236,00	45.008.942,00	15,61%
5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	71.167.046,00	8.844.500,00	12,43%
5	1	3	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	257.418.056,05	20.056.332,00	7,79%
5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	500.664.124,00	20.334.500,00	4,06%
5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	248.370.000,00		0,00%
5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	62.760.000	5.170.500,00	8,24%
5	1	3	02.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	189.534.124,00	15.164.000,00	8,00%
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.094.410.038,00	32.736.504,00	2,99%
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	881.993.604,50	9.548.500,00	1,08%
5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72.539.905,50	3.637.500,00	5,01%
5	1	3	02.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	139.876.528,00	19.550.504,00	13,98%
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	515.422.070,00	29.030.500,00	5,63%
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	515.422.070,00	29.030.500,00	5,63%
5	5	2	02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	186.700.000,00	4.396.000,00	2,35%
5	5	2	02.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			2,35%
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	328.722.070,00	24.634.500,00	7,49%
5	5	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	328.722.070,00	24.634.500,00	7,49%

Apabila dilakukan pencermatan pada beberapa sub kegiatan, kinerja yang dicapai tidak dibarengi dengan realisasi anggaran. Hal ini terjadi karena adanya pertimbangan efisiensi serta dalam rangka menyederhanakan manajemen penatausahaan keuangan dengan mengurangi sub kegiatan yang dipandang kurang efektif sehingga bisa digabung dengan sub kegiatan lainnya. Dengan pertimbangan tersebut maka tidak dilakukan serapan anggaran pada sub

kegiatan dimaksud dan selanjutnya dilakukan pada perubahan APBD tahun 2025.

Lebih lanjut terkait rincian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sampai dengan Triwulan I tahun 2025 pada tiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d

Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Trenggalek

		111W UIA	n i ianun	2025 Kabu	paten 11	Ciiggaick			
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja Tahun	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	s/d dengan tahun 2024	2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5.01	PERENCANAAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	106,09	100	46,89	46,89	153	152,89
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95	96,89	95	91,58	96,40	188	198,39
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	95,98	100	19,23	19,23	115	115,21
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	213	291	104	20	19,23	311	146,01
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	19	28				28	147,37
	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	29	15	3	20	32	118,52
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	88	88				88	100
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132	155	89	17	19,10	172	130,30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja Tahun	Keluaran s	a Program dan /d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	100	100	75	75	175	175
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100	100				100	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	95	40	54	135	149	115,50
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	12	10				10	83,33
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18	49	34	17	50	66	366,67
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100	116,67	100	25	25	142	141,67
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	8	24				24	300
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	30	12	3	25	33	275
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	116,67	100	70	70	187	186,67
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	65						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3						
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah personil yang mengikuti diklat	20	107				107	535

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja	Keluaran s	a Program dan /d Triwulan I n 2025		arget Renstra s/d 1 I Tahun 2025
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	61	10	7	70,00	68	226,67
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	100,98	100	15,63	15,63	117	116,61
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	350	350				350	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	10	6			10	20,83
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	442	442				442	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	10	6	1	16,67	11	18,33
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	600	650				650	108,33
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	5	2	33,33	14	23,33
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	10340	10340				10340	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	13	10			13	43,33
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Material yang dipenyediaan	7504	9054				9054	120,66
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	9	4			9	15
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	50	50				50	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja	Keluaran s	ja Program dan /d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
11040	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4	4	1	25	5	41,67
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	16	16				16	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	4	1	25	7	58,33
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	9200	9511				9511	103,38
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	24	12	3	25	27	75,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	120	100			120	120
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1	1				1	100
	Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8						
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	50				50	833,33
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12	15				15	125
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	34	6			34	377,78
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	111,33	100	26,92	26,92	138	138,25
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang difasilitasi	600	600				600	100
X.XX.01.2.08.02		Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi	53293	88787				88787	166,60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja Tahun	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi	456	555				555	121,71
	Penyediaan Jasa	Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi	20	20				20	100
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi	924000	1113089				1113089	120,46
	Daya Ali dali Distrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	105	60	15	25	120	400
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diisediakan	180	119				119	66,11
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8	4	1	25	9	75,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11	10				10	90,91
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	28	13	4	30,77	32	106,67
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	100	23,72	23,72	124	123,72
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	1	2				2	200
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2						
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	115	64				64	55,65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
		Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	difasilitasi jasa pemeliharaannya Jumlah Kendaraan Dinas	156	106	52	19	36,54	125	80,13
	Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan	20	6				6	30
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	15	1			15	50
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan	58	58				58	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117	78	39	3	7,69	81	69,23
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	18	18				18	100
	Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	6	4	1	25	7	58,33
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	13	10	3			10	76,92
	DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	448	368	82			368	82,14
		Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	65	46	13	2	15,38	48	73,85

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Kinerja Tahun	Keluaran s/	a Program dan d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
		Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan Bupati	12	9	4			9	75
		Jumlah Dokumen RPJMD yang Disusun	1	1				1	100
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan dokumen RPJMD dan RKPD	80	122				122	152,50
	Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah tahapan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6	6				6	100
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah event Konsultasi Publik	2	3				3	150
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	3	2	2	100	5	166,67
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	2				2	100
	Perangkat Daerah	Jumlah even Forum SKPD/Lintas SKPD	2	2				2	100
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	3	2	2	100,00	5	166,67
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	3				3	150
		Jumlah even Musrenbang Kabupaten	2	3				3	150
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3	3	2	1	50	4	133,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja Tahun	Keluaran s	a Program dan /d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
		Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	2				2	100
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2337	4451	2100	2155	102,62	6606	282,67
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	5	5				5	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	7	2			7	116,67
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis dan pengelolaan data yang disusun	10	8				8	80
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi	Jumlah fasilitasi pengelolaan data	6	5				5	83,33
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian elemen data e-database SIPD	66,67	60,77				61	91,15
		Jumlah pembahasan dokumen	12	6				6	50
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	40	41	8	2	25	43	107,50
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan	4	5				5	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja Tahun	Keluaran s/	a Program dan d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	s/d dengan tahun 2024	2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	16	16				16	100
	Daerah PROGRAM	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan pengendalian evaluasi	10	8				8	80
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	51	26	12	2	16,67	28	54,90
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing- masing bidang di atas 80%	100	93,34	100			93	93,34
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	40	39	7	1	14,29	40	100
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	100	95,46	100			95	95,46
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	15	14	3	1	33,33	15	100
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	8	17				17	212,50
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	4	3				3	75
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20	20				20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran	Target Kinerja Tahun	Keluaran s	a Program dan d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	s/d dengan tahun 2024	2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	4	8				8	200
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	12	5	1	20	13	65
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15	9	4	1	25	10	66,67
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah dokumen laporan Bidang Perencanaan Pemerintahan yang disusun	1	1				1	100
	Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	14	20				20	142,86
	Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	12	8				8	66,67
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	15	34	14	8	57,14	42	280
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	20	25				25	125
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	5	6				6	120
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	20				20	166,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025			Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	8	8				8	100
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	44	27				27	61,36
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah dokumen laporan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	8	8				8	100
	Manusia	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	26	30				30	115,38
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	8	9				9	112,50
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perkonomian dan SDA di atas 80%	100	89,30	100			89	89,30
	,	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	12	10	2			10	83,33
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	18	12				12	66,67
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun	2	2				2	100
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	8	11				11	137,50
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	11	29				29	263,64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	18	8	4			8	44,44
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	8	4			8	66,67
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10	32				32	320
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian yang disusun	3	1				1	33,33
	Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	13						
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	24	19				19	79,17
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6	4	2			4	66,67
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	12	89				89	741,67
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	1	1				1	100
	RKPD)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10	12				12	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025			Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	18	18				18	100
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	100	86,21	100			86	86,21
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	17	22	6			22	129,41
5.01.03.2.03.01	Koordinasi	Jumlah asistensi	5	14				14	280
	Penyusunan	perencanaan							
	Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10						
	Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10						
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2	2				2	100
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10	26				26	260
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20	47				47	235
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	13	7	5			7	53,85
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	12	8	4	1	25	9	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja	Keluaran s	a Program dan d Triwulan I n 2025	Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Daerah Bidang Infrastruktur							
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3	3				3	100
	Harmonisasi Perencanaan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10						
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	22	27				27	122,73
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20	42				42	210
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10	3	4			3	30
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Asistensi Perencanaan	13	16				16	123,08
	Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3	3				3	100
	Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	20	32				32	160
	·	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	55	68				68	123,64
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4	4				4	100
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	4	18				18	450
	Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20	42				42	210
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	20	16	4			16	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
11040	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024		Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	8	5	2			5	62,50
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah fasilitasi kelitbangan Bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan	1	5				5	500
	Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen litbang Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	1	1				1	100
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4	7	2			7	175
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2	1				1	50
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1						
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2						
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	2						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Pelaksanaan	Peraturan yang							
5.05.02.2.02	Peraturan Penelitian dan	Diterbitkan  Jumlah dokumen	22						
5.05.02.2.02	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	22						
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil	1						
	Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial							
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil	2						
3.03.02.2.02	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2						
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2						
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1						
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1						
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	31	4				4	12,90
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1						
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program	Target Kinerja	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan	s/d Tahun 2025	dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3	1				1	33,33
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen litbang Bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun Jumlah Dokumen Hasil	2	1				1	100
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan							
5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2						
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2						
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0						
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2						
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1						
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2						
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang disusun	2	2				2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan Sebelum Perubahan	Target Capaian RENSTRA	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran s/d dengan tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Triwulan I tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
	Daerah dan Program		s/d Tahun 2025			Realisasi Kinerja Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	2						
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2						
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi yang disusun	11	7	2			7	63,64
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan	Jumlah fasilitasi Inovasi dan teknologi	2	2				2	100
	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen litbang dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	4	4				4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	3	2			3	100
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6						

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, serta tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut diimplementasikan pada program dan dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu indikatif.

Pagu indikatif setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
- b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
- c. Menghitung alokasi pagu dari seriap output kegiatan untuk program;
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah. kebijakan, menentukan merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

	Adapun	rencana	program,	kegiatan,	sub	kegiatan	dan	pendanaan	indikatif
tahun	2025 ad	alah seb	agai berik	ut:					

Tabel 3.1.

Rencana Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 202

Kabupaten Trenggalek

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kinerj	a Dan Kerangka Pendana	an		-		Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber	Priori	tas	
						Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DAERAH					AN PEMBANGUNAN, PENE	LITIAN DAN PENC	GEMBANGAN	11.609.750.989,00	11.637.346.820,00	11.468.299.136,00					
	5	UI				UNSUR PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN			11.609.750.989,00	11.637.346.820,00	11.468.299.136,00					
	5	01 PERENC				PERENCANAAN				11.004.750.989,00	11.121.924.750,00	9.792.354.136,00					
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi; Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100; 100; 95 %; %; %	100; 100; 95 %; %; %	7.670.522.689,00	7.606.654.549,95	7.557.276.729,94					
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Juniah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	104 dokumen	104 dokumen	40.000.000,00	27.433.445,65	27.433.445,65			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Perangkat Daerah
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen	Perencanaan Perangkat Da	erah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	14.467.893,65	3.353.199,75	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyus	sunan Laporan Capaian Kine	rja dan Ikhtisar Re	alisasi Kinerja SKP	D					•	•	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89 Laporan	89 Laporan	20.000.000,00	12.965.552,00	3.504.492,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kiner	ja Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber	Priori	tas	
		Kegiatan / Sub Kegiatan   Nama		Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah				
	5					Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	6.232.355.620,00	6.321.445.684,00	6.321.445.684,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan 1											1
	5	01	01	2.02	0002	Deputation Administr	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6.089.355.620,00	6.190.049.684,00	6.490.762.967,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	UI	UI	2.02	0002	Penyediaan Administra	Jumlah Dokumen Hasil	34 Dokumen	34 Dokumen	143.000.000,00	131.396.000,00	105.425.964,48	Kab.	Dana	Memperkuat	Peningkatan	1
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Alokasi Umum (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	17.600.000,00	15.854.000,00	15.854.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Baran	ig Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.600.000,00	15.854.000,00	16.040.250,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.05	0009	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	19.739.600,00	14.000.000,00	14.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kiner	ja Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program /	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Cumban	Priori	tas	ouourur
		Kegiatan Sub Ke					Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	7 Orang	19.739.600,00	14.000.000,00	11.600.001,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	569.900.000,00	413.386.000,00	413.386.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang
	5	01	01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.391.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan	dan Perlengkapan Kantor		•	•	•	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	6.594.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Log	gistik Kantor		•	•	•	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	19.959.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Ce	etakan dan Penggandaan	-									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	9.094.706,82	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Ma	terial										

						Urusan / Bidang					Capaian Kinerji	a Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Priorit	as	Sasaiaii
						Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
			21	0.00	0000		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	99.700.000,00	99.700.000,00	47.835.400,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	8000	Fasilitasi Kunjungan T	amu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.467.000,00	Kab. Trenggalek,	Dana Alokasi	Memperkuat reformasi politik,	Peningkatan Tata Kelola	
							Tamu						Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Umum (DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rap	at Koordinasi dan Konsultasi										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	246.606.000,00	166.418.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip	<u> </u>										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	10.880.000,00	7.521.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesalkan	100 %	100 %	47.821.569,00	106.753.470,00	106.753.470,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan		Laur		I .= =		T	T.v.	-			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	15 Unit	47.821.569,00	106.753.470,00	140.954.099,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kinerj	ja Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program /	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			C	Priori	tas	
						Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	492.000.000,00	482.965.000,00	482.965.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Kom	unikasi, Sumber Daya Air da				T	T	T	-			1
	5	01	01	2.08	0003	Penyerliaan Jasa Pers	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	114.887.400,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	9	01	01	2.00	0003	i Griyeulaan Jasa Fela	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	9.275.245,00	Kab.	Dana	Memperkuat	Peningkatan	1
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Alokasi Umum (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pela	,										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	315.000.000,00	305.965.000,00	194.854.760,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	251.105.900,00	224.816.950,30	224.816.950,30			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	ASN Bappedalit bang
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pem	eliharaan, Biaya Pemeliharaa	. ,			1 3						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	138.165.900,00	146.466.950,30	126.044.500,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	•	•	•	•	•	•					

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kinerj	ja Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Kegiatan / Sub	Targ	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber	Priori	tas	
		Kegiatan Sub Kegiatan Kegiatan Jumlah Mebel					Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralata											
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	24.940.000,00	24.940.000,00	28.212.500,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
		01	01	2.00	0011	1 cincinaraan/1 chabii	Jumlah Sarana dan	4 Unit	2 Unit	86.000.000.00	51.410.000,00	44.081.244.89	Kab.	Dana	Memperkuat	Peningkatan	
							Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Alokasi Umum (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	13 82 3 dokumen dokumen dokumen	13 82 3 dokumen dokumen dokumen	998.000.000,00	1.303.280.700,00	817.459.232,17					
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan Bupati	4 dokumen	4 dokumen	818.000.000,00	1.193.072.000,00	1.193.072.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsulta											
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	80.500.000,00	182.755.000,00	77.111.257,80	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	

						Urusan / Bidang	Indilustes Decrees /				Capaian Kinerj	ja Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No		Urunan / Brogram / Indik					Indikator Program / Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber	Priori	tas	Gusululi
						Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah	1
															judi, dan penyeludupan.		
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaa	an Forum Perangkat Daerah/L	intas Perangkat D	aerah								1
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	56.725.000,00	50.874.000,00	17.566.444,15	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenba	• '										
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	222.865.366,00	248.831.000,00	131.873.850,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koo	rdinasi Musrenbang Kecamat										
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2100 Usulan	2154 Usulan	45.000.000,00	20.538.000,00	6.168.387,82	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusuna	n dan Penetapan Dokumen P		•			•	•				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	412.909.634,00	690.074.000,00	528.669.965,10	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	02	2.03	0003	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	180.000.000,00	110.208.700,00	110.208.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kinerj	a Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber	Priori	tas	Cusulun
						Kegiatan Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	110.208.700,00	56.069.327,30	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembargunan yang Disusun Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing- masing bidang di atas 80%	7 100 dokumen %	7 100 dokumen %	2.336.228.300,00	2.211.989.500,05	1.417.618.173,89					
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun Persentase rata-rata capalan kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	100 % 3 dokumen	100 % 3 dokumen	714.500.000,00	616.915.338,05	616.915.338,05			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusuna	n Dokumen Perencanaan Pe	mbangunan Daera	h Bidang Pemerint			•		•			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	3 Dokumen	349.224.500,00	288.330.236,00	138.644.198,43	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitorin	ng dan Evaluasi Penyusunan				0				•	,	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	89.800.000,00	71.167.046,00	45.532.499,20	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaa	an Sinergitas dan Harmonisas	i Perencanaan Pe	mbangunan Daeral	h Bidang Pemerintahan				•	, paryonaaapan.		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstraf/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	14 Laporan	29 Laporan	275.475.500,00	257.418.056,05	118.341.499,70	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	

						Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kinerj	ja Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program /	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Complete	Prior	tas	Gusululi
						Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang perkonomian dan SDA di atas 80%	100 % 2 dokumen	100 % 2 dokumen	540.646.000,00	500.664.124,00	500.664.124,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusuna	an Dokumen Perencanaan Pe	mbangunan Daera	h Bidang Perekond	omian (RPJPD, RPJMD o	dan RKPD)	I	1	L	1	1	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	275.000.000,00	248.370.000,00	87.083.821,21	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitorin	ng dan Evaluasi Penyusunan	Dokumen Perenca	naan Pembanguna		•						
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	62.760.000,00	62.760.000,00	58.145.091,61	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaa	an Sinergitas dan Harmonisas										
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	202.886.000,00	189.534.124,00	126.970.652,15	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	100 % 6 Dokumen	100 % 3 Dokumen	1.081.082.300,00	1.094.410.038,00	1.094.410.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusuna	an Dokumen Perencanaan Pe										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	3 Dokumen	782.510.000,00	881.993.604,50	728.005.045,89	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	

						Urusan / Bidang	In Planta Barrery				Capaian Kinerj	a Dan Kerangka Pendana	an				Kelompok Sasaran
No			Kod	е		Urusan / Program /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			0	Priori	tas	Gusuiun
						Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
												2020			judi, dan penyeludupan.		
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitorin	ng dan Evaluasi Penyusunan	I Dokumen Perenca	I ınaan Pembanguna	I an Perangkat Daerah Bid	lang Infrastruktur	1	1	1	I	l	
			0	0.00	0004		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1 Laporan	122.513.300,00	72.539.905,50	34.490.175,70	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaa	an Sinergitas dan Harmonisas				1		1				1
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1 Laporan	176.059.000,00	139.876.528,00	80.405.190,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	05				PENELITIAN DAN PEI	NGEMBANGAN	•		605.000.000,00	515.422.070,00	1.675.945.000,00		•		•	•
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	605.000.000,00	515.422.070,00	1.675.945.000,00					
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	305.000.000,00	186.700.000,00	186.700.000,00			Memperkuat reformasi politiik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaar	n dan Evaluasi Penelitian dan	Pengembangan B	idang Pemerintaha	an Umum		•					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	2 Laporan	305.000.000,00	186.700.000,00	371.945.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
	5	05	02	2.04	0001	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang disusun gisusun ngan, dan Perekayasaan di B	2 dokumen	2 dokumen	300.000.000,00	328.722.070,00	328.722.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	Kabupaten Trenggale k

## Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

				Urusan / Bidang	Indikator Program /				Capaian Kinerja	Dan Kerangka Pendanaa	ın				Kelompok Sasaran
- 1	No	Ko	de	Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Kegiatan / Sub	Targe	et 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber	Priorit	tas	
				Kegiatan Kegiatan	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	328.722.070,00	1.304.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi yang Melayani	
							JUMLAH	11.609.750.989,00	11.637.346.820,00	11.468.299.136,00					

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja menjadi sangat penting, artinya dalam mengaplikasikan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Penyusunan Perubahan Renja sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Sekretariat, Bidang dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA dengan berpedoman pada KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2025.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

**MOCHAMAD NUR ARIFIN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI AGUSTI**A**NI NIP. 19671223 199203 2 004